

LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN BA.018  
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2020

Puslitbang Hortikultura  
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020

Jl. Tentara Pelajar No. 3C, Cimanggu, Bogor

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Puslitbang Hortikultura adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Puslitbang Hortikultura mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Puslitbang Hortikultura. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bogor, Januari 2021  
Kuasa Pengguna Anggaran,

  
Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si  
NIP 196809181993031002

- Kata Pengantar
- Daftar Isi
- Pernyataan Tanggung Jawab
- Ringkasan
- I. Laporan Realisasi Anggaran
- II. Neraca
- III. Laporan Operasional
- IV. Laporan Perubahan Ekuitas
- V. Catatan atas Laporan Keuangan
  - A. Penjelasan Umum
  - B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
    - B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak
    - B.2. Belanja
    - B.3. Belanja Pegawai
    - B.4. Belanja Barang
    - B.5. Belanja Modal
      - B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
      - B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
  - C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
    - C.1. Aset Lancar
      - C.1.1. Kas Lainnya dan Setara Kas
      - C.1.2. Persediaan
    - C.2. Aset Tetap
      - C.2.1. Peralatan dan Mesin
      - C.2.2. Gedung dan Bangunan
      - C.2.3. Jalan, Irigasi dan Jaringan
      - C.2.4. Aset Tetap Lainnya
      - C.2.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan
      - C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
    - C.3. Piutang Jangka Panjang
    - C.4. Aset Lainnya
      - C.4.1. Aset Lain-lain
      - C.4.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
    - C.5. Kewajiban Jangka Pendek
    - C.6. Ekuitas
      - C.6.1. Ekuitas
  - D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
    - D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
    - D.2. Beban Pegawai
    - D.3. Beban Persediaan
    - D.4. Beban Barang dan Jasa
    - D.5. Beban Pemeliharaan
    - D.6. Beban Perjalanan Dinas
    - D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

- D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
  - E.1. Ekuitas Awal
  - E.2. Surplus/Defisit-LO
  - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
    - E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap
  - E.4. Transaksi Antar Entitas
    - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
    - E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
    - E.4.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung
  - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
  - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
  - F.2. Pengungkapan Lain-lain



## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Puslitbang Hortikultura Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp223.401.135,00 atau mencapai 8.938,05% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp2.500.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp13.093.195.074,00 atau mencapai 98,20% dari alokasi anggaran sebesar Rp13.333.278.000,00

### II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020.

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp14.693.425.453,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp827.848.378,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp13.865.131.995,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp445.080,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp14.693.425.453,00.

### III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.830.436,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp13.588.910.900,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-13.583.080.464,00, Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp208.893.517,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-13.374.186.947,00.

### IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp16.129.971.230,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-13.374.186.947,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan ditambah

Transaksi Antar Entitas sebesar Rp11.937.641.170,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp14.693.425.453,00.

#### V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**PUSLITBANG HORTIKULTURA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019**

Uraian	Catatan	31 Desember 2020			31 Desember 2019
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	2.500.000,00	223.401.135,00	8.936,05	107.090.146,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>223.401.135,00</b>	<b>8.936,05</b>	<b>107.090.146,00</b>
<b>BELANJA</b>					
Belanja Pegawai	B.3.	4.033.645.000,00	3.952.367.762,00	97,98	4.104.209.455,00
Belanja Barang	B.4.	8.601.170.000,00	8.442.956.616,00	98,16	11.057.337.151,00
Belanja Modal	B.5.	498.263.000,00	697.866.496,00	99,94	556.878.000,00
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>13.333.278.000,00</b>	<b>13.093.195.074,00</b>	<b>98,20</b>	<b>15.718.424.606,00</b>

## II. NERACA

**PUSLITBANG HORTIKULTURA**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019**

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas Lainnya dan Selera Kas	C.1.1	727.236.898,00	1.160.889.667,00
Persediaan	C.1.2	100.611.480,00	36.651.042,00
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>827.848.378,00</b>	<b>1.197.540.709,00</b>
<b>Aset Tetap</b>			
Peralatan dan Mesin	C.2.1	10.277.010.879,00	10.205.115.183,00
Gedung dan Bangunan	C.2.2	13.275.061.217,00	13.275.061.217,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.3	1.319.270.000,00	1.319.270.000,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.4	19.657.000,00	19.657.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.5	11.650.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6	-11.037.517.101,00	-9.890.353.445,00
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>13.865.131.995,00</b>	<b>14.928.749.955,00</b>
<b>Aset Lainnya</b>			
Aset Lain-lain	C.4.1	476.928.600,00	480.716.362,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.2	-476.483.720,00	-477.035.796,00
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>445.080,00</b>	<b>3.680.566,00</b>
<b>Jumlah Aset</b>		<b>14.893.425.463,00</b>	<b>16.129.971.230,00</b>
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ekuitas</b>			
Ekuitas	C.6	14.893.425.463,00	16.129.971.230,00
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>14.893.425.463,00</b>	<b>16.129.971.230,00</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>		<b>14.893.425.463,00</b>	<b>16.129.971.230,00</b>



### III. LAPORAN OPERASIONAL

#### PUSLITBANG HORTIKULTURA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019

Ursian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	5.830.436,00	23.256.936,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>5.830.436,00</b>	<b>23.256.936,00</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2.	3.952.367.782,00	4.104.209.455,00
Beban Persediaan	D.3.	1.582.247.361,00	1.567.725.679,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	4.309.097.700,00	4.512.109.651,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	901.692.695,00	751.532.731,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	1.580.994.006,00	4.274.158.335,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	1.262.541.376,00	1.819.054.390,00
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>13.588.910.900,00</b>	<b>17.028.790.241,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>-13.583.080.464,00</b>	<b>-17.005.533.305,00</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.8.	78.100.899,00	5.250.000,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.8.	3.680.566,00	3.032.574,00
Pendapatan dan Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	155.644.970,00	178.575.230,00
Beban dan Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	21.171.766,00	27.064.133,00
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>208.893.517,00</b>	<b>153.728.523,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>		<b>-13.374.186.947,00</b>	<b>-16.551.804.782,00</b>

## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**PUSLITBANG HORTIKULTURA**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019**

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
EKUITAS AWAL	E.1.	16.129.971.230,00	17.523.354.885,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-13.374.186.547,00	-18.851.804.782,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	0,00	-1.313.803.000,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.1.	0,00	-1.313.803.000,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	11.937.841.170,00	16.772.224.127,00
EKUITAS AKHIR	E.5.	14.693.425.453,00	16.129.971.230,00

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Puslitbang Hortikultura

Kantor Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura adalah salah satu pusat penelitian di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang didirikan pada tahun 1984, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tanggal 6 Maret 1984, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang hortikultura, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Tugas tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015. Berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No 3C, Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu, Bogor, Kantor Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Menyiapkan perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan hortikultura;
- Merumuskan program penelitian dan pengembangan hortikultura;
- Melaksanakan kerjasama dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan hortikultura;
- Melaksanakan penelitian dan pengembangan hortikultura;
- Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan hortikultura, dan;
- Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura berkomitmen dengan visi *"menjadi lembaga penelitian dan pengembangan terkemuka penghasil inovasi hortikultura mendukung agribisnis hortikultura modern"*

Makna dari visi ini adalah:

- Lembaga Penelitian dan Pengembangan Terkemuka artinya lembaga yang dinamis tumbuh sebagai *fast learning organization* yang menjadi leader kegiatan penelitian dan pengembangan hortikultura di Indonesia dalam mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis
- Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
- Agribisnis adalah bisnis hortikultura berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya yang bergerak dari sektor hulu hingga hilir



- Hortikultura Modern adalah kegiatan yang bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan input dan sumberdaya melalui proses yang efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk menghasilkan produk-produk hortikultura yang memiliki nilai tambah dan daya saing tinggi.

Untuk mencapai visi tersebut di atas, Kantor Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura menindaklanjuti dengan misi yaitu:

- Menghasilkan teknologi inovasi yang memiliki karakter tepat guna, efisien, efektif dan berkelanjutan;
- Pengembangan sistem diseminasi teknologi inovasi yang efektif dan efisien.

Makna dari misi tersebut adalah sebagai *scientific recognition* dan *impact recognition* bagi pembangunan agribisnis hortikultura Indonesia yang berdaya saing.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, Kantor Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Optimalisasi dan pengembangan sumberdaya manusia dan penelitian dalam rangka memacu peningkatan produktivitas dan kualitas penelitian (*scientific recognition*), dan menghasilkan produk hortikultura berwawasan lingkungan, aman dan sehat serta dihasilkan dalam waktu yang singkat, efisien dan berdampak luas (*impact recognition*) melalui kegiatan diseminasi yang intensif;
- Meningkatkan perakitan dan penyediaan varietas/galur unggul (yang dapat menjawab permasalahan dan preferensi konsumen), benih dan inovasi system perbenihan berdaya saing serta memperkuat Unit Pengelolaan Benih Sumber (UPBS);
- Memanfaatkan teknologi yang bersifat *high technology* untuk analisis genom dan ekspresi gen dalam mempercepat penciptaan varietas unggul baru hortikultura;
- Mengembangkan inovasi teknologi yang tepat guna sesuai dengan permasalahan;
- Meningkatkan kerja sama penelitian dan pengembangan dengan lembaga nasional dan internasional terutama untuk mewujudkan industri hortikultura yang tangguh;
- Meningkatkan promosi dan diseminasi hasil penelitian melalui *spectrum multi channel* kepada seluruh *stakeholders* nasional melalui jejaring PPP (*public-private-partnership*), maupun internasional untuk mempercepat proses pencapaian sasaran pembangunan hortikultura (*impact recognition*) pengakuan ilmiah internasional (*scientific recognition*) dan perolehan sumber-sumber pendanaan penelitian lainnya di luar APBN (*external fundings*);
- Meningkatkan kuantitas, kualitas dan kapabilitas sumberdaya penelitian melalui perbaikan sistem rekrutmen dan pelatihan SDM, penambahan sarana dan prasarana, dan struktur penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan institusi

litbang hortikultura dalam mewujudkan sistem bioindustri hortikultura berkelanjutan;

- Mengoptimalkan pemanfaatan dana penelitian melalui *re-focusing* program, penajaman sasaran dan target, serta efisiensi prosedur dan metode penelitian.

## A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Puslitbang Hortikultura. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

## A.3. Basis Akuntansi

Puslitbang Hortikultura menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Puslitbang Hortikultura dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dan imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.



Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Puslitbang Hortikultura yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Puslitbang Hortikultura adalah sebagai berikut:

##### (1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

##### (2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

##### (3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) **Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) **Aset**

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:



Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
  - Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
    - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
    - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
    - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.
- b. Aset Tetap**
- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
  - Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
  - Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
    - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
    - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
    - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jaken, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modem)	4 tahun

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.



- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan,

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.



- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang
  - a. Kewajiban Jangka Pendek  
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.  
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang  
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Puslitbang Hortikultura telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	2.500.000,00	2.500.000,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.285.185.000,00	4.008.997.000,00
Belanja Lembur	23.659.000,00	24.978.000,00
Belanja Barang Operasional	1.919.432.000,00	1.960.837.000,00
Belanja Barang Non Operasional	3.331.810.000,00	1.408.165.000,00
Belanja Barang Persediaan	2.075.588.000,00	1.601.093.000,00
Belanja Jasa	1.552.550.000,00	1.048.990.000,00
Belanja Pemeliharaan	950.462.000,00	956.889.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.684.500.000,00	1.594.805.000,00
Belanja Perjalanan Luar Negeri	0,00	32.891.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	398.500.000,00	686.613.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	251.500.000,00	11.650.000,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>16.452.987.000,00</b>	<b>13.333.278.000,00</b>

## B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp223.401.135,00 atau mencapai 8,936,05% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

## Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	%
Akun Pendapatan			

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	%
<b>Akun Pendapatan</b>			
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	2.500.000,00	83.931.335,00	3.357,25
Pendapatan Lain-lain	0,00	139.469.800,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>223.401.135,00</b>	<b>8.936,05</b>

Realisasi Pendapatan TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 108,61% dibandingkan TA 2019. Peningkatan tersebut merupakan rerata dari peningkatan Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN dan kenaikan pendapatan berupa pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp139.469.800,00. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Puslitbang Hortikultura adalah sebagai berikut:

**Perbandingan Realisasi Pendapatan  
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	83.931.335,00	28.506.936,00	194,42
Pendapatan Lain-lain	139.469.800,00	78.583.210,00	77,48
<b>Jumlah</b>	<b>223.401.135,00</b>	<b>107.090.146,00</b>	<b>108,61</b>

Realisasi Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN mengalami peningkatan sebesar 194,42% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 karena adanya lelang/penjualan BMN yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2020 dan telah disetorkan ke negara berdasarkan SSBP.

Sedangkan Pendapatan Lain-lain mengalami peningkatan sebesar 77,48% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019. Hal ini merupakan pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp139.469.800 berdasarkan SSBP.

## B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2020 adalah sebesar Rp13.093.195.074,00 atau 98,20% dari anggaran belanja sebesar Rp13.333.278.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2020 adalah sebagai berikut:



Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per  
31 Desember 2020

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	,%
Belanja Pegawai	4.033.845.000,00	3.953.488.008,00	98,01
Belanja Barang	8.601.170.000,00	8.444.125.159,00	98,17
Belanja Modal	698.293.000,00	697.868.496,00	99,94
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>13.333.278.000,00</b>	<b>13.095.481.663,00</b>	<b>98,22</b>
Pengembalian Belanja		-2.286.589,00	0,00
<b>Total Belanja</b>	<b>13.333.278.000,00</b>	<b>13.093.195.074,00</b>	<b>98,20</b>

Dibandingkan dengan Tahun 2019, Realisasi Belanja TA 2020 mengalami penurunan sebesar -16,70% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Realisasi Belanja, baik berupa Belanja Pegawai, Belanja Barang, maupun Belanja Modal, semua mengalami penurunan dengan rerata sebesar -16,70% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Penurunan Belanja Pegawai sebesar -3,70%, penurunan Belanja Barang sebesar Rp -23,64%, dan penurunan Belanja Modal sebesar -25,32%

Perbandingan Realisasi Belanja  
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	,%
Belanja Pegawai	3.952.367.762,00	4.104.209.455,00	-3,70
Belanja Barang	8.442.958.816,00	11.087.337.151,00	-23,64
Belanja Modal	697.868.496,00	556.878.000,00	25,32
<b>Total Belanja</b>	<b>13.093.195.074,00</b>	<b>15.718.424.606,00</b>	<b>-16,70</b>

## B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp3.952.367.762,00 dan Rp4.104.209.455,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2020 mengalami penurunan sebesar -3,70% dari TA 2019.

Perbandingan Belanja Pegawai  
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.929.829.008,00	4.079.887.252,00	-3,68
Belanja Lembur	23.659.000,00	24.880.000,00	-4,91
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>3.953.488.008,00</b>	<b>4.104.767.252,00</b>	<b>-3,69</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	-1.120.246,00	-557.797,00	100,83
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.952.367.762,00</b>	<b>4.104.209.455,00</b>	<b>-3,70</b>

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi belanja pegawai yang berakhir sampai 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 3,70 persen dibandingkan realisasi belanja pada periode 31 Desember 2019. Penurunan ini terjadi antara lain karena adanya mutasi pegawai berupa pemberhentian pejabat struktural (Kepala Pusat) menjadi pejabat fungsional dan pindah institusi (Balitjestro), adanya mutasi berupa promosi jabatan (diangkat menjadi Kepala Museum Pertanian) ke institusi lain (PUSTAKA), adanya mutasi pegawai (Gusrianto) ke institusi lain (Balitbu), dan adanya pegawai yang memasuki masa purna bakti. Selain itu juga disebabkan adanya pembayaran Gaji Tunjangan Hari Raya (THR), dimana tidak semua pegawai dibayarkan THR-nya (untuk pegawai dengan jenjang Jabatan Struktural Eselon II, dan pegawai dengan Jenjang Jabatan Fungsional Utama tidak dibayarkan). Pembayaran THR ini telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tanggal 9 Mei 2020.

#### 8.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp8.442.958.816,00 dan Rp11.057.337.151,00. Realisasi belanja barang TA 2020 mengalami penurunan sebesar -23,64% dari TA 2019.

Perbandingan Belanja Barang  
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1.949.441.175,00	1.788.865.246,00	10,21
Belanja Barang Non Operasional	1.396.791.991,00	1.867.277.305,00	-25,99
Belanja Barang Persediaan	1.596.009.512,00	1.509.677.027,00	5,72
Belanja Jasa	962.864.534,00	855.967.099,00	12,49
Belanja Pemeliharaan	956.887.598,00	761.392.138,00	25,68



Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.549.239.349,00	4.218.860.004,00	-63,28
Belanja Perjalanan Luar Negeri	32.891.000,00	57.024.483,00	-42,32
Jumlah Belanja Kotor	8.444.125.159,00	11.059.063.303,00	-23,65
Pengembalian Belanja Barang	-1.166.343,00	-1.726.152,00	-32,43
Jumlah Belanja	8.442.958.816,00	11.057.337.151,00	-23,64

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi belanja barang yang berakhir sampai 31 Desember 2020 mengalami penurunan rerata sebesar 23,64 persen dibandingkan realisasi belanja pada periode 31 Desember 2019. Meskipun demikian, tidak semua jenis belanja mengalami penurunan. Ada beberapa jenis belanja yang justru mengalami kenaikan 100% dibandingkan TA 2019, karena jenis belanja tersebut tidak dialokasikan pada tahun 2019, misalnya Belanja Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19, Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19 berupa multivitamin dan penambah daya tahan tubuh; test kesehatan/rapid test dan operasional lainnya. Namun demikian, ada juga jenis belanja pada tahun 2019 yang tidak dialokasikan pada 2020 setelah adanya refocusing anggaran, seperti belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota, dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota. Penurunan juga terjadi antara lain karena adanya penurunan belanja berupa belanja perjalanan dinas sebagai dampak dari pandemi *virus corona* sehingga pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dalam rangka rapat dan/atau kegiatan sejenis dilakukan secara daring (online).

Pengelolaan Jenis Belanja dengan akun covid tersebut, mengacu kepada Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: S-308/PB/2020 tanggal 9 April 2020 Tentang Penegasan Biaya/Belanja Yang Dapat Dibebankan Pada DIPA Satker Dalam Masa Darurat Covid-19, Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020 Tentang Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19)*; dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor: 1399/SE/KU.040/A/04/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Biaya/Belanja Yang Dapat Dibebankan Pada DIPA Kementerian Pertanian Dalam Masa Darurat Covid-19.

Dengan adanya realokasi anggaran perjalanan dinas untuk dipindahkan menjadi anggaran penanganan pandemi covid 19 terdapat biaya/belanja beserta akun pada DIPA satker Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura yang berakhir sampai 31 Desember 2020, adalah sebagai berikut

- Belanja Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid 19 berupa konsumsi pegawai WFO;
- Belanja Jasa Penanganan Pandemi Covid 19 berupa pemberian honor nara sumber dan moderator;
- Belanja Perjalanan Dinas Penanganan Pandemi Covid 19 berupa biaya transport pegawai WFO;

- Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid 19 berupa multivitamin dan penambah daya tahan tubuh; tes kesehatan/rapid tes dan operasional lainnya (misalnya spanduk sosialisasi penanganan covid-19);
- Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi Covid 19 berupa pembelian hand sanitizer, desinfektan, dan APD lainnya.

#### B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp697.868.496,00 dan Rp556.878.000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 25,32% dibandingkan TA 2019.

Perbandingan Belanja Modal  
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	686.218.496,00	98.954.000,00	593,47
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.650.000,00	457.924.000,00	-97,46
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>697.868.496,00</b>	<b>556.878.000,00</b>	<b>25,32</b>
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>697.868.496,00</b>	<b>556.878.000,00</b>	<b>25,32</b>

Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 terdiri atas belanja Modal Peralatan dan Mesin, serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Kenaikan realisasi belanja modal pada tahun 2020 lebih disebabkan karena pagu anggaran yang tersedia lebih besar dibandingkan tahun 2019, dan metode pengadaannya menggunakan e-katalog, dimana proses pengadaannya relatif lebih cepat.

##### B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp686.218.496,00 dan Rp98.954.000,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 593,47% dibandingkan TA 2019.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
----------------------	----------------------------	----------------------------	----------------



Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	686.218.496,00	96.954.000,00	593,47
Jumlah Belanja Kotor	686.218.496,00	96.954.000,00	593,47
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	686.218.496,00	96.954.000,00	593,47

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi berupa camera/webcam, printer dan personal computer. Sedangkan pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor, berupa lemari arsip (*roll opack*), drone, dan mesin absensi. Kenaikan realisasi yang sangat tinggi (593,47%) dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 lebih disebabkan karena pagu anggaran pada 2020 lebih besar, barang-barang yang akan dibeli dan proses pengadaannya sederhana dengan menggunakan metode e-katalog sehingga prosesnya lebih cepat.

#### B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp11.650.000,00 dan Rp457.924.000,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020 mengalami penurunan sebesar -97,46% dibandingkan TA 2019.

##### Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.650.000,00	457.924.000,00	-97,46
Jumlah Belanja Kotor	11.650.000,00	457.924.000,00	-97,46
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	11.650.000,00	457.924.000,00	-97,46

Belanja Modal Gedung dan Bangunan ini sedianya akan menambah nilai kapitalisasi gedung dan bangunan untuk gedung arsip. Namun sehubungan dengan kondisi pandemi covid-19, maka dilakukan refokusing anggaran, yang salah satunya adalah mengurangi pagu anggaran penambahan nilai fisik gedung dan bangunan. Pekerjaan yang dilakukan pada tahun 2020 adalah penambahan sarana fisik bangunan penunjang dan kantor berupa Sarana Display Kantor, serta biaya operasional pengadaan barang dan jasa untuk perjalanan Panitia/Tim Pengadaan dalam melakukan survei harga.



## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

## C.1. ASET LANCAR

## C.1.1. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp727.236.898,00 dan Rp1.160.889.687,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas  
per 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2020
Sisa dana Hibah ACIAR	328.921.450,00
Sisa Dana Hibah BBTV	398.315.448,00
<b>Jumlah</b>	<b>727.236.898,00</b>

## C.1.2. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp100.611.480,00 dan Rp36.651.042,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo Persediaan tahun 2020 sangat tinggi dibandingkan tahun 2019 karena pada tahun 2020 ini barang atau perlengkapan (*supplies*) untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat penggunaannya terkendala adanya pandemi covid-19 dimana banyak kegiatan yang batal dilaksanakan. Kondisi ini sangat mempengaruhi Saldo Persediaan pada tahun 2020. Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan  
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Barang Konsumsi	0,00	36.091.500,00
Bahan untuk Pemeliharaan	0,00	559.542,00
Persediaan Lainnya	100.611.480,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>100.611.480,00</b>	<b>36.651.042,00</b>

## C.2. ASET TETAP

## C.2.1. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Puslitbang Hortikultura per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, adalah masing-masing sebesar Rp10.277.010.879,00 dan Rp10.205.115.183,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	10.205.115.183,00
<b>Mutasi Tambah</b>	
Pembelian	686.218.496,00
<b>Mutasi Kurang</b>	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-112.322.800,00
Transfer Keluar	-502.000.000,00
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>10.277.010.879,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	-9.500.731.929,00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2020</b>	<b>776.278.950,00</b>

Mutasi tambah atas nilai Peralatan dan Mesin senilai Rp686.218.496 (Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), berasal dari:

1. Pembelian 2 unit Pompa Air dengan total nilai Rp4.500.000;
2. Pembelian 1 unit Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) senilai Rp478.000.000;
3. Pembelian 2 unit Lemari Besi/Metal dengan total nilai Rp71.994.396;
4. Pembelian 1 unit Mesin Absensi senilai Rp5.000.000;
5. Pembelian 3 unit Lemari Es dengan total nilai Rp11.950.000;
6. Pembelian 3 unit A.C. Split dengan total nilai Rp14.775.000;
7. Pembelian 3 unit Treng Air/Tandon Air dengan total nilai Rp5.100.000;
8. Pembelian 1 unit Camera Conference senilai Rp5.000.000;
9. Pembelian 1 unit Kamera Udara senilai Rp49.300.000;
10. Pembelian 1 unit Data Logger senilai Rp3.534.100;
11. Pembelian 1 unit Personal Computer senilai Rp 14.999.000;
12. Pembelian 1 unit Laptop senilai Rp8.800.000;
13. Pembelian 3 unit Printer dengan total nilai Rp13.266.000.

Mutasi kurang atas nilai Peralatan dan Mesin senilai Rp614.322.800 (Enam Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah), berasal dari:

1. Transfer keluar senilai Rp24.000.000,00 merupakan transfer keluar peralatan dan mesin ke satker Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika berdasarkan

Berita Acara Serah Terima Nomor: B-1084/PL.310/H.3/08/2020 tanggal 5 Agustus 2020;

2. Transfer keluar senilai Rp478.000.000,00 merupakan transfer keluar peralatan dan mesin ke satker Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: B-1848/PL.020/H.3/12/2020 tanggal 1 Desember 2020;
3. Penghentian Aset dari Penggunaan senilai Rp112.322.800 merupakan peralatan dan mesin yang sudah rusak dan tidak dapat digunakan dalam operasional kantor. Selanjutnya peralatan dan mesin tersebut akan dihapuskan.

#### C.2.2. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Puslitbang Hortikultura per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp13.275.061.217,00 dan Rp13.275.061.217,00.

#### C.2.3. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Puslitbang Hortikultura per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.319.270.000,00 dan Rp1.319.270.000,00.

#### C.2.4. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Puslitbang Hortikultura per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp19.657.000,00 dan Rp19.657.000,00.

#### C.2.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Puslitbang Hortikultura per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp11.650.000,00 dan Rp0,00, yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian lebih lanjut dari Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

#### C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Puslitbang Hortikultura per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp-11.037.517.101,00 dan Rp-9.890.353.445,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi



dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

## Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	10.277.010.879,00	-9.500.731.929,00	776.278.950,00
2.	Gedung dan Bangunan	13.276.081.217,00	-874.426.172,00	12.400.635.045,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.319.270.000,00	-662.389.000,00	656.911.000,00
4.	Aset Tetap Lainnya	19.657.000,00	0,00	19.657.000,00
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>24.890.999.096,00</b>	<b>-11.037.517.101,00</b>	<b>13.853.481.995,00</b>

## C.4. ASET LAINNYA

## C.4.1. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Puslitbang Hortikultura per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp476.928.800,00 dan Rp480.716.362,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Puslitbang Hortikultura serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	480.716.362,00
<b>Mutasi Tambah</b>	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	112.322.800,00
<b>Mutasi Kurang</b>	
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	-116.110.362,00
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>476.928.800,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	-476.483.720,00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2020</b>	<b>445.080,00</b>

Mutasi tambah atas nilai Aset Lainnya senilai Rp112.322.800 (Seratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah), berasal dari:

1. Penghentian Aset dari Penggunaan senilai Rp112.322.800 merupakan peralatan dan mesin yang sudah rusak dan tidak dapat digunakan dalam operasional kantor. Selanjutnya peralatan dan mesin tersebut akan dihapuskan.

Mutasi kurang atas nilai Aset Lainnya senilai Rp116.110.362 (Seratus Enam Belas Juta Seratus Sepuluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), berasal dari:

1. Penghapusan (BMN yang Dihentikan) senilai Rp116.110.362 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 30/Kpts/PL.320/A/01/2020 tanggal 10 Januari 2020. Penghapusan aset ini berdasarkan risalah lelang nomor: RL/1904/32/2019 tanggal 07 Oktober 2019 dengan nilai limit Rp1.095.000,00 dan perolehan penjualannya Rp5.250.000,00.

#### C.4.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Puslitbang Hortikultura per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp-476.483.720,00 dan Rp-477.035.796,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

#### Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Lain-lain	476.928.800,00	-476.483.720,00	445.080,00
	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>476.928.800,00</b>	<b>-476.483.720,00</b>	<b>445.080,00</b>

### C.6. EKUITAS

#### C.6. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp14.693.425.453,00 dan Rp16.129.971.230,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp5.830.436,00 dan Rp23.256.936,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya  
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	3.975.000,00	5.700.000,00	-30,26
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.855.436,00	17.556.936,00	-89,43
<b>Jumlah</b>	<b>5.830.436,00</b>	<b>23.256.936,00</b>	<b>-74,93</b>

Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan senilai Rp1.855.436,00 berupa potongan gaji bagi pegawai yang menempati rumah jabatan pada bulan Januari s/d Desember 2020 dan Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi senilai Rp3.975.000,00 merupakan sewa mess kantor Puslitbang Hortikultura.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp3.952.367.762,00 dan Rp4.104.209.455,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai  
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	2.528.425.360,00	2.738.184.110,00	-7,66
Beban Pembulatan Gaji PNS	29.454,00	39.986,00	-26,34
Beban Tunj. Anak PNS	51.887.990,00	53.999.734,00	-3,91



Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Tunj. Beras PNS	115.944.420,00	123.475.100,00	-8,10
Beban Tunj. Fungsional PNS	443.970.000,00	378.500.000,00	16,99
Beban Tunj. PPh PNS	37.294.258,00	51.319.181,00	-27,33
Beban Tunj. Struktural PNS	162.355.000,00	177.380.000,00	-8,47
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	204.297.360,00	221.809.344,00	-7,94
Beban Tunjangan Umum PNS	48.754.900,00	56.735.000,00	-16,99
Beban Uang Lembur	23.659.000,00	24.680.000,00	-4,91
Beban Uang Makan PNS	335.750.000,00	274.808.000,00	22,18
Jumlah	3.952.367.762,00	4.104.209.455,00	-3,70

Beban pegawai terdiri atas:

- a) Beban Gaji Pokok PNS merupakan beban belanja gaji pokok PNS;
- b) Beban Pembulatan Gaji PNS merupakan beban belanja pembulatan gaji PNS;
- c) Beban Tunjangan Anak PNS merupakan belanja tunjangan anak PNS;
- d) Beban Tunjangan Beras PNS merupakan beban belanja tunjangan beras PNS;
- e) Beban Tunjangan Fungsional PNS merupakan beban belanja tunjangan fungsional PNS;
- f) Beban Tunjangan PPh PNS merupakan beban belanja tunjangan PPh PNS;
- g) Beban Tunjangan Struktural PNS merupakan beban belanja tunjangan struktural PNS;
- h) Beban Tunjangan Suami/Istri PNS merupakan beban belanja tunjangan suami/istri PNS;
- i) Beban Tunjangan Umum PNS merupakan beban belanja tunjangan umum PNS;
- j) Beban Uang Lembur merupakan beban uang lembur golongan II, III, IV dan uang makan lembur golongan II, III, dan IV;
- k) Beban Uang Makan PNS merupakan beban belanja uang makan PNS golongan II, III dan IV.

#### D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.582.247.361,00 dan

Rp1.567.725.679,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipesarkan maupun tidak dipesarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan  
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	71.472.442,00	34.284.322,00	108,47
Beban Persediaan konsumsi	539.499.893,00	844.660.980,00	-36,13
Beban persediaan lainnya	971.275.026,00	688.790.377,00	41,01
<b>Jumlah</b>	<b>1.582.247.361,00</b>	<b>1.567.725.679,00</b>	<b>0,93</b>

Beban persediaan terdiri atas:

- Beban Persediaan bahan baku berupa bahan bakar dan oli;
- Beban persediaan konsumsi merupakan pemakaian alat tulis kantor;
- Beban persediaan lainnya terdiri peralatan penunjang penelitian seperti pupuk, pestisida, bibit/benih, dan lain-lain.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4.309.097.700,00 dan Rp4.512.109.651,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa  
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Bahan	612.612.656,00	1.215.555.951,00	-33,15
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	48.360.000,00	0,00	0,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	419.249.335,00	396.721.355,00	5,68
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	39.074.400,00	0,00	0,00
Beban Barang Operasional Lainnya	165.127.753,00	175.546.112,00	-5,93

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	174.540.000,00	193.980.000,00	-10,02
Beban Honor Output Kegiatan	116.550.000,00	275.000.000,00	-57,62
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	299.632.500,00	0,00	0,00
Beban Jasa Konsultan	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00
Beban Jasa Lainnya	33.200.000,00	78.445.000,00	-57,68
Beban Jasa Profesi	221.660.000,00	286.900.000,00	-22,47
Beban Keperluan Perkantoran	1.547.907.722,00	1.399.336.134,00	10,62
Beban Langganan Air	1.557.450,00	1.309.200,00	18,96
Beban Langganan Listrik	264.300.726,00	269.573.186,00	-1,96
Beban Langganan Telepon	40.403.858,00	48.789.713,00	-13,65
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	22.791.300,00	0,00	0,00
Beban Sewa	81.610.000,00	153.450.000,00	-46,82
<b>Jumlah</b>	<b>4.309.097.700,00</b>	<b>4.512.109.651,00</b>	<b>-4,50</b>

Beban barang dan jasa terdiri atas:

- Beban bahan merupakan beban belanja fotocopy, jilid, spanduk, bahan pendukung kegiatan non operasional lainnya dan konsumsi semua kegiatan di Puslitbang Hortikultura;
- Beban barang non operasional merupakan beban belanja biaya pengiriman publikasi, benih dan upah harian dari beberapa kegiatan di Puslitbang Hortikultura;
- Beban barang operasional lainnya merupakan beban pengadaan pakaian dinas pegawai;
- Beban honor operasional satuan kerja merupakan beban honor Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Anggaran, Petugas UAKPB, Panitia Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, TIM SAI dan BMN;
- Beban honor output kegiatan merupakan beban honor Tim Penyusunan Penerbitan Jurnal Hortikultura, Tim Penyusunan Majalah Iptek, Honor Ketua dan Anggota Tim Penilai Peneliti Unit, Honor Ketua dan Anggota Tim Peneliti Unit Teknisi Litkayasa;
- Beban jasa konsultan merupakan beban jasa pementapan pelaksanaan ISO 9001:2008 dan audit eksternal/surveillance oleh lembaga sertifikasi;
- Beban jasa lainnya merupakan beban kegiatan rekomendasi kebijakan komoditas hortikultura dan layanan dukungan manajemen satker;



- h) Beban jasa profesi merupakan beban untuk honor nara sumber dan moderator;
- i) Beban keperluan perkantoran merupakan beban untuk membayar honor satpam, *cleaning service*, pengemudi dan pramubakti, honor pembantu administrasi, langganan surat kabar, barang cetakan dan keperluan rumah tangga kantor, operasional genset, operasional satpam/pengamanan, langganan internet, pengiriman surat, paket dan dokumen lainnya;
- j) Beban langganan air merupakan beban langganan air;
- k) Beban langganan listrik merupakan beban langganan listrik;
- l) Beban langganan telpon merupakan beban langganan telpon;
- m) Beban sewa merupakan beban sewa stand pameran, sewa ruangan dan sewa kendaraan untuk raker (minibus/bus).

#### D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp901.692.695,00 dan Rp751.532.731,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan  
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	299.527.000,00	261.547.500,00	14,39
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	583.562.000,00	428.579.026,00	36,16
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	17.543.695,00	60.565.205,00	-71,03
Beban Persediaan suku cadang	1.050.000,00	541.000,00	95,93
Jumlah	901.692.695,00	751.532.731,00	19,98

Beban pemeliharaan terdiri atas:

- a) Beban pemeliharaan gedung dan bangunan terdiri dari pemeliharaan: gedung kantor; halaman gedung kantor; gedung rumah jabatan; dan halaman rumah dinas.
- b) Beban pemeliharaan peralatan dan mesin terdiri dari pemeliharaan: kendaraan roda 4 pejabat eselon II; kendaraan roda 4 operasional; kendaraan roda 6 operasional; kendaraan roda 2; instalasi listrik; jaringan internet; pompa air; printer; komputer dan laptop; mesin faximile; AC; LCD Projector; mesin absensi; genset; dan PABX.

- c) Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan berupa peralatan rumah tangga seperti peralatan makan dan minum, pengharum ruangan dan lain-lain;
- d) Beban persediaan suku cadang berupa air coolant radiator.

#### D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.580.964.006,00 dan Rp4.274.158.335,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas  
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	1.472.384.140,00	3.661.413.591,00	-59,68
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	32.891.000,00	57.024.483,00	-42,32
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	54.150.000,00	0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.538.866,00	134.830.000,00	-84,03
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	147.471.503,00	-100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	283.418.758,00	-100,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.580.964.006,00</b>	<b>4.274.158.335,00</b>	<b>-63,01</b>

- a. Beban Perjalanan Biasa merupakan anggaran perjalanan yang digunakan untuk beberapa kegiatan antara lain koordinasi, konsultasi, konsolidasi, konsinyasi, pengumpulan data, pembinaan, pelaksanaan di lapangan, penyusunan laporan, monitoring evaluasi, pengolahan data, sosialisasi, survey, dan sebagainya.
- b. Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota merupakan anggaran perjalanan untuk beberapa kegiatan antara lain pameran, sosialisasi, koordinasi dan pengumpulan materi dalam kota.
- c. Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota merupakan anggaran perjalanan untuk kegiatan sosialisasi, koordinasi dan rapat di luar jam kerja.
- d. Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota merupakan anggaran perjalanan untuk kegiatan yang dilakukan di luar kota sebagai uang harian dan transport.



## D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.262.541.376,00 dan Rp1.819.054.390,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi  
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	277.177.710,00	276.677.612,00	0,11
Beban Penyusutan Irigasi	2.274.566,00	8.457.413,00	-73,11
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	159.048.621,00	212.326.920,00	-25,09
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1.747.540,00	11.527.595,00	-84,84
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	822.294.937,00	1.309.662.850,00	-37,22
<b>Jumlah</b>	<b>1.262.541.376,00</b>	<b>1.819.054.390,00</b>	<b>-30,59</b>

- a) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan merupakan penyusutan nilai gedung dan bangunan yang dilakukan secara otomatis dalam aplikasi SIMAK BMN.
- b) Beban Penyusutan Irigasi merupakan penyusutan nilai irigasi dari aplikasi SIMAK BMN.
- c) Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan merupakan penyusutan nilai jalan dan jembatan dari aplikasi SIMAK BMN.
- d) Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin merupakan penyusutan seluruh peralatan dan mesin yang penjournalannya dilakukan dari aplikasi SIMAK BMN sesuai dengan umur ekonomis barang masing-masing.

## D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:



Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional  
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-3.680.566,00	-3.032.574,00	21,37
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-21.171.786,00	-27.064.133,00	-21,77
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	16.175.170,00	99.992.020,00	-83,82
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	5.250.000,00	-100,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	78.100.899,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	66.146.000,00	14.790.000,00	347,23
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	5.513.700,00	14.756.210,00	-62,64
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	67.810.100,00	49.035.000,00	38,29
<b>Jumlah</b>	<b>208.893.517,00</b>	<b>153.728.523,00</b>	<b>35,88</b>

- a. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp51.710.100,00 diperoleh dari:
- Pengembalian kelebihan belanja tunjangan fungsional atas nama Idha Widi Arsanti sebesar Rp4.500.000
  - Pengembalian kelebihan belanja tunjangan fungsional atas nama Hardiyanto sebesar Rp39.000.000

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp16.129.971.230,00 dan Rp17.523.354.885,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp-13.374.186.947,00 dan Rp-16.851.804.782,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-1.313.803.000,00.

E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-1.313.803.000,00.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp11.937.641.170,00 dan Rp16.772.224.127,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2020.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2020
Ditagihkan ke Entitas Lain	11.434.309.341,00
Diterima dari Entitas Lain	-223.401.135,00
Transfer Keluar	-498.500.000,00
Pengesahan Hibah Langsung	1.225.232.964,00
<b>Jumlah</b>	<b>11.937.641.170,00</b>

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2020 saldo DDEL adalah sebesar Rp-223.401.135,00 sedangkan DKEL sebesar Rp11.434.309.341,00.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp-498.500.000,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Keluar per 31 Desember 2020.

No	Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin	018090199411971000KP	-478.000.000,00
2.	Peralatan dan Mesin	018090800412050000KD	-24.000.000,00
3.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	018090800412050000KD	3.500.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>-498.500.000,00</b>

E.4.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.225.232.964,00 dan Rp2.585.781.445,00.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1.	ACIAR	Uang	948.529.164,00
2.	BBTV	Uang	276.703.800,00
<b>Jumlah Nilai Hibah</b>			<b>1.225.232.964,00</b>

E.5. Ekuitas Akhir



Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp14.693.425.453,00 dan Rp16.129.971.230,00.

## F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

### F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 257/KPTS/KU.010/A/4/2020 tanggal 29 April 2020 telah ditetapkan Pit Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura sehubungan Kuasa Pengguna Anggaran yang lama telah kembali menjadi pejabat fungsional peneliti;
2. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/KPTS/Kp.230/M/8/2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kementerian Pertanian, Kuasa Pengguna Anggaran yang semula atas nama Dr. Waryat menjadi Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si.

### F.2. Pengungkapan Lain-lain

- a. Sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal, pagu awal satker Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura sebesar Rp16.452.987.000,00 (enam belas miliar empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan pagu sampai 30 September 2020 sebesar Rp11.406.424.000,00 (sebelas miliar empat ratus enam juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah). Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: 8/MK.02/2020 tentang Kegiatan dan Realokasi Anggaran K/L dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 dan surat Sekjen Kementerian Pertanian Nomor: B-1080/RC.110/A/03/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Refocussing Anggaran dan Kegiatan TA 2020 Antisipasi Dampak Penyebaran COVID19, selama periode berjalan satker Puslitbang Hortikultura telah melakukan empat kali revisi dari DIPA awal. Revisi DIPA Puslitbang Hortikultura sampai dengan tanggal 30 September 2020 dengan rincian sebagai berikut:
  - Revisi pertama, merupakan revisi DIPA pertama melalui melalui Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu pada tanggal 27 April 2020 dengan pengurangan dan penambahan anggaran belanja sehingga pagu pada revisi DIPA pertama menjadi sebesar Rp14.238.137.000,00.
  - Revisi kedua, merupakan revisi DIPA kedua melalui Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu pada tanggal 28 Mei 2020, dengan pemutakhiran akun dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sehingga pagu pada revisi DIPA kedua sebesar Rp14.238.137.000,00.
  - Revisi ketiga, merupakan revisi DIPA ketiga melalui melalui Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu tanggal 22 Juni 2020 dengan pengurangan anggaran belanja sehingga pagu pada revisi ketiga menjadi sebesar Rp10.699.079.000,00;
  - Revisi keempat, merupakan revisi DIPA keempat melalui melalui Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu tanggal 4 September 2020 dengan dengan penambahan anggaran belanja sehingga pagu pada revisi keempat menjadi sebesar Rp11.406.424.000,00;

- b. Puslitbang Hortikultura melaksanakan penjualan lelang dengan perantara KPKNL Bogor yang telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor S-1530/WKN.08/KNL.03/2020 tanggal 09 April 2020 guna melaksanakan Surat Keputusan Nomor S-156/KM.06/WKN.08/KNL.03/2019 tanggal 17 Desember 2019. Pelelangan diumumkan oleh penjual melalui Surat Kabar Harian Radar Bogor tanggal 17 April 2020 dan barang yang dilelang berupa 2 unit Mobil Roda 4 dan 2 unit Sepeda Motor dengan nilai limit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dalam pelaksanaan lelang tidak ada yang mengajukan penawaran.
- c. Pada bulan Desember 2020 Puslitbang Hortikultura melakukan lelang ulang sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor S-5129/WKN.08/KNL.03/2020 tanggal 16 Desember 2020 berupa 2 unit Mobil Roda 4 dan 2 unit Sepeda Motor dengan nilai limit Rp39.797.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan Surat Persetujuan Penjualan dari KPKNL Bogor Nomor S-92/MK.6/WKN.08/KNL.03/2020. Pemenang lelang telah melunasi pembayaran dan telah disetorkan ke kas negara senilai Rp78.100.899 berdasarkan SSBP dengan No NTPN 5AE3D1JNEQFS38K1 dan Risalah Lelang Nomor RL-2334/32/2020 tanggal 29 Desember 2020. Selanjutnya akan diusulkan permohonan Surat Keputusan Penghapusan ke Kementerian Pertanian.
- d. Puslitbang Hortikultura juga melakukan lelang untuk peralatan mesin berupa laptop, printer, personal computer dan lain-lain dengan nilai limit sebesar Rp1.395.000,00 pada Bulan Agustus 2020 berdasarkan Surat Penetapan Lelang Nomor S-3042/WKN.08/KNL.03/2020 tanggal 13 Agustus 2020. Namun, pemenang lelang tidak melunasi pembayaran. Kemudian Puslitbang Hortikultura melakukan lelang ulang berdasarkan Surat Penetapan Lelang Nomor S-4566/WKN.08/KNL.03/2020 tanggal 11 November 2020, namun pemenang lelang juga tidak melunasi pembayaran.
- e. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura memiliki gedung kantor yang terdiri atas lahan milik Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian yang dipinjam pakai berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai Antara Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura dengan Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian.